

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2020

LKjIP



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

LKjIP Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen nyata Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Akhirnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025, semoga LKjIP ini akan bermanfaat bagi peningkatan kinerja Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, 16 Maret 2026
CAMAT PURWOKERTO TIMUR

OKA YUDHISTIRA PRANAYUDHA, S.STP.,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19811212200012 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2025 menyajikan pengukuran hasil kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing tujuan/sasaran dan indikator tujuan telah dianalisis, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja berdasar target kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu. Laporan ini menyajikan pula uraian program beserta anggarannya, realisasi anggaran yang mendukung realisasi tujuan dan sasaran yang diambil Kecamatan Purwokerto Timur dalam mencapai tujuan/sasaran atau indikator kinerja.

Dalam Rencana Kinerja Tahun 2025 ditetapkan 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator tujuan, 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator sasaran. Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas didukung oleh 5 (lima) program dengan 5 (lima) indikator kinerja program, 12 (dua belas) kegiatan dengan 12 indikator kinerja kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan dengan 32 (tiga puluh satu) indikator sub kegiatan yang harus dicapai.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2024 – 2026, dan renja perubahan tahun 2025 terdapat tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2025 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang masing-masing mempunyai indikator kinerja sebagai berikut:

- Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas
Indikator : Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
- Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan
Indikator : 1. Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan
2. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan
- Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan
Indikator: 1. Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan
2. Nilai Maturitas SPIP Kecamatan

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan. Berdasarkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan:

1. Indikator Kinerja Tujuan Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dari target 100% realisasi sebesar 105,4% dengan capaian Kinerja 105,4%
2. Indikator kinerja Sasaran Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan dari target 100% terealisasi sebesar 105,64% dengan capaian kinerja mencapai 105,64%
3. Indikator kinerja Sasaran Indeks Pelayanan Publik Kecamatan dari target 3,51 terealisasi nilai 4,07 dengan capaian 115,95%
4. Indikator kinerja Sasaran Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan dari target nilai 83,92 terealisasi nilai 82,20 dengan capaian kinerja 97,95%.
5. Indikator kinerja Sasaran Nilai Maturitas SPIP Kecamatan dari target nilai 3,35 terealisasi dengan 3,419 dengan capaian 102,06%

Hasil pengukuran capaian sasaran strategis Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dari 1 tujuan dan 2 sasaran dengan 5 indikator, satu yang belum tercapai yaitu indikator kinerja sasaran Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan belum memenuhi target. Berikut capaian realisasi anggaran dan tingkat efisiensi pada sasaran indikator Kinerja Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas:

Indikator kinerja sasaran 1 dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas yaitu Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan dan Indeks Pelayanan Publik Kecamatan dari pagu anggaran sebesar Rp 1.428.281.412,- (Satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta duaratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah) terealisasi sebesar Rp 1.407.696.883,- (satu milyar empat ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) atau 98,56%. Sedangkan capaian kinerja sasaran tercapai 110,80% maka dapat dijabarkan dan dievaluasi keberhasilannya. Untuk efisiensi capaian sasaran yang pertama ini sebesar $(110,80\% - 98,56\%) = 12,24\%$.

Indikator kinerja sasaran 2 dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas yaitu Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 9.772.261.185,- (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah) terealisasi sebesar Rp 7.709.680.869,- (tujuh milyar tujuh ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan

rupiah) atau 78,89%. Sedangkan capaian kinerja sasaran tercapai 100,01% maka dapat dijabarkan untuk efisiensi capaian sasaran kedua ini sebesar $(100,01\% - 78,89\%) = 21,12\%$.

Anggaran Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 sebesar Rp 11.200.542.597,- dengan realisasi sebesar Rp Rp 9.117.377.752,- atau penggunaan sebesar 81,40% sehingga ada efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 2.083.164.845,- atau 18,60%.

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 4 (empat) Indikator Kinerja menunjukkan 3(tiga) indikator telah efisien karena indikator kinerja dapat dicapai sebesar 100% atau lebih, 1 (satu) indikator belum mencapai target dan persentase penyerapan anggaran kurang dari 100%.

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	2
C. Susunan Organisasi	5
D. Sumber Daya Aparatur	6
E. Isu Strategis.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis	8
B. Perjanjian Kinerja.....	12
C. Rencana Anggaran Tahun 2025.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Analisis Capaian Kinerja	25
C. Realisasi Anggaran.....	63
D. Efisiensi dan Efektivitas	76
E. Prestasi dan Penghargaan	78
F. Inovasi	78
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja	80
B. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	ASN berdasarkan Golongan
Tabel 1.2	ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2024 – 2026
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2024 - 2026
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
Tabel 2.4	Anggaran Belanja Sebelum dan Sesudah Perubahan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025
Tabel 2.5	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan APBD-P Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Dua Tahun Sebelumnya Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
Tabel 3.5	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
Tabel 3.6	Efisiensi Anggaran Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Realisasi Keuangan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025
Tabel 3.8	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025
Tabel 3.9	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan Tahun 2025 dengan Dua Tahun Sebelumnya Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan Tahun 2025 dengan Target Renstra Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
Tabel 3.11	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, Provinsi dan Kabupaten Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025
Tabel 3.12	Efisiensi Anggaran pada capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas tahun 2025
Tabel 3.13	Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan realisasi Keuangan pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas tahun 2025
Tabel 3.14	Perbandingan Target dan realisasi kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan Tahun

- 2025 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
- Tabel 3.15 Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
- Tabel 3.16 Hasil Penjaminan Kualitas atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
- Tabel 3.17 Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dua tahun sebelumnya Kecamatan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
- Tabel 3.18 Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan target Renstra sasaran meningkatnya akuntabilitas pemerintah Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025
- Tabel 3.19 Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan standar nasional Provinsi dan Kabupaten Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025
- Tabel 3.20 Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025
- Tabel 3.21 Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan realisasi keuangan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025
- Tabel 3.22 Perbandingan target dan realisasi kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
- Tabel 3.23 Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan dua tahun sebelumnya Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
- Tabel 3.24 Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan target Renstra Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
- Tabel 3.25 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
- Tabel 3.26 Efisiensi Anggaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025
- Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Realisasi Keuangan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025
- Tabel 3.28 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
- Tabel 3.29 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Dua Tahun sebelumnya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
- Tabel 3.30 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

- Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
- Tabel 3.32 Efisiensi Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025
- Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Realisasi Keuangan Tahun 2025 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
- Tabel 3.34 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
- Tabel 3.35 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Dua Tahun Sebelumnya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
- Tabel 3.36 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
- Tabel 3.37 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
- Tabel 3.38 Efisiensi Anggaran Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025
- Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Realisasi Keuangan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025
- Tabel 3.40 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
- Tabel 3.41 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Dua Tahun Sebelumnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
- Tabel 3.42 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
- Tabel 3.43 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
- Tabel 3.44 Efisiensi Anggaran Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
- Tabel 3.45 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Realisasi Keuangan Tahun 2025 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
- Tabel 3.46 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

Tabel 3.47 Realisasi Anggaran Belanja Kecamatan Purwokerto Timur
Kabupaten Banyumas

Tabel 3.48 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dan 6
Kelurahan

Tabel 3.49 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja Tahun
2025 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

Tabel 3.50 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tahun 2025
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 Struktur Organisasi Kecamatan Purwokerto Timur	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden tersebut, yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sehingga ruang lingkup penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta review dan evaluasi kinerja. Dengan demikian akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi instansi pemerintah secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review, yang merupakan pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Purwokerto Timur

Kabupaten Banyumas, mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sedangkan untuk proses evaluasi terhadap SAKIP, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Purwokerto Timur memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Kecamatan Purwokerto Timur merupakan salah satu Kecamatan dari 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Kecamatan Purwokerto Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan

pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Kecamatan Purwokerto Timur mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; JDIH Kabupaten Banyumas
 - 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 5) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - 7) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;

- 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
- d. Koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati.
- e. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
- 1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada bupati.
- f. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- 1) Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- g. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
- 1) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;

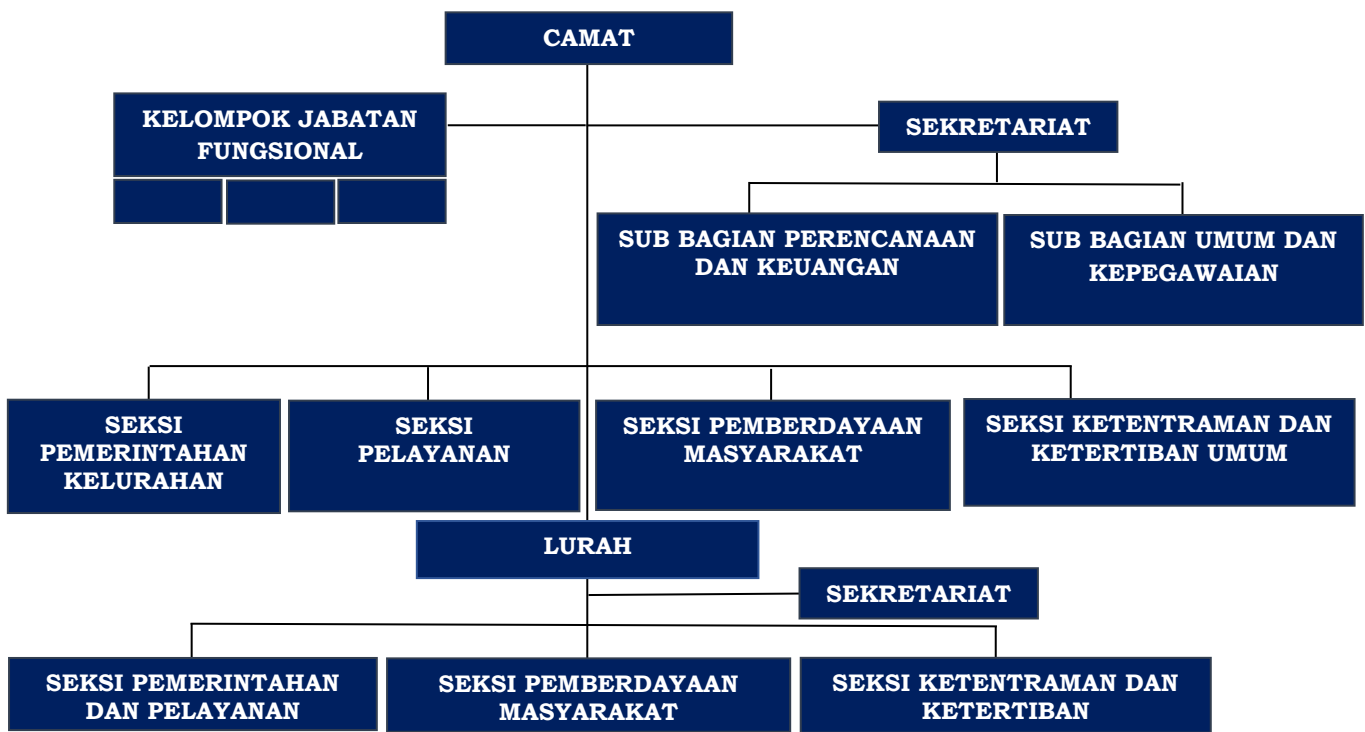
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 - 1) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah;
- j. Penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Kelurahan;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Kelurahan, terdiri dari:
 - 1. Lurah;
 - 2. Sekretariat;
 - 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan;
 - 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - 5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Gambar 1
Struktur Organisasi Kecamatan Purwokerto Timur



D. SUMBER DAYA APARATUR

Kondisi sumber daya aparatur pada Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas terbanyak adalah pegawai Golongan III (66,67%). Secara lengkap komposisi pegawai dapat dilihat pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1.
ASN berdasarkan Golongan

Golongan	Laki - laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi %
A. ASN				
Golongan I	1	0	1	2,22%
Golongan II	1	3	4	8,89%
Golongan III	11	19	30	66,67%
Golongan IV	2	1	3	6,67%
B. PPPK	6	1	7	15,56%
Jumlah	21	24	45	100%

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, 2025

2. Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah ASN Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 berdasarkan jenjang pendidikan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2.
ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki - laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi %
SD	0	0	0	0,00%
SMP	2	0	2	4,44%
SMA	7	2	9	20,00%
D-I	0	0	0	0,00%
D-II	0	0	0	0,00%
D-III	2	3	5	11,11%
S-1	7	20	27	60,00%
S-2	2	0	2	4,44%
S-3	0	0	0	0,00%
Jumlah	20	25	45	100%

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, 2025

Berdasarkan tabel 1.2 diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SMP dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) dan sebagian besar berpendidikan S-1 (60,00%).

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi menjadi isu strategis jika kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang jika tidak dimanfaatkan. Dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu strategis Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026 adalah :

1. Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.
2. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
3. Peningkatan sarana dan prasarana Kecamatan dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Perubahan peraturan perundang-undangan sehingga belum sepenuhnya dapat terintegrasi secara baik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas adalah dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Amanat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Dampak pelaksanaan pilkada serentak secara nasional akan terjadi kekosongan jabatan disejumlah daerah karena adanya masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom baru. Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 untuk menyusun Dokumen perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana

Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.

Renstra Kecamatan Purwokerto Timur merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada pencapaian target jangka menengah selama kurun waktu lima tahun (2025-2029) sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Purwokerto Timur dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Kecamatan Purwokerto Timur telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Mendasarkan pada Rencana pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 adalah **BANYUMAS 2025 SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING, SERTA LESTARI**, dengan prioritas sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah;
3. Menangani Kemiskinan dan Pengangguran serta Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Memperkuat ketahanan pangan.

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi

yang telah diidentifikasi sebelumnya. Visi RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 dijabarkan kedalam delapan Misi RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 yaitu:

- a. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera
Membangun masyarakat Kabupaten Banyumas yang sejahtera mengandung maksud bahwa di Kabupaten Banyumas terbangun suatu sistem pembangunan sedemikian rupa sehingga secara bertahap masyarakat Kabupaten Banyumas dapat memenuhi secara wajar segala kebutuhan hidup (fisik dan psikhis), yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan kualitasnya, melalui terjalinnya hubungan yang harmonis antara manusia (individu) – lingkungan alam – masyarakat (lingkungan sosial) – Tuhan (sesuai ajaran agama masing-masing).
- b. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri
Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri mengandung pengertian bahwa semua unsur pemangku kepentingan pembangunan: masyarakat, swasta dan pemerintah, dengan potensi Kabupaten Banyumas secara bertahap, profesional dapat memenuhi kebutuhan pengembangan kehidupan tanpa tergantung pihak lain, sebagai sarana untuk membangun kepercayaan sehingga dapat bekerja sama saling menguntungkan dengan pihak lain.
- c. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing
Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing adalah membangun sistem pemberdayaan masyarakat yang secara bertahap dapat merubah sifat pola pikir yang tradisional pragmatis menjadi sifat pola pikir yang inovatif, prediktif, kompetitif sedemikian rupa sehingga dengan pengembangan kearifan lokal agar dapat berperan serta secara aktif di dunia internasional.
- d. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari
Membangun daerah Kabupaten Banyumas yang lestari dengan mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan menciptakan kondisi yang menjamin kontinuitas pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas, Tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan

penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan visi, emmecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang akan dicapai Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas”

2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yaitu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan sebanyak 2 sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan;
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan.

Adapun tujuan, sasaran dan target indikator Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
Tahun 2024 - 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada tahun		
					2024	2025	2026
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan			100%	100%	100%
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	100%	100%	100%
				Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	NA	3,72	3,73
			Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	83,9%	83,92%	83,95%
				Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	NA	3,391	3,433

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purwokerto Timur
Kabupaten Banyumas Tahun 2024 - 2026

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	PENJELASAN
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Formulasi : Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50% Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan + 50% Capaian Akuntabilitas Type Perhitungan = Progres Positif Sumber Data = Laporan hasil Pelayanan dan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Perangkat Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Perubahan, perjanjian kinerja tahun 2025 perubahan dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2025

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2025 Perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

NO	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	Tujuan			
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	Formulasi = Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50% Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan 50% + Capaian Akuntabilitas Type Perhitungan = Progres Positif Sumber Data = Laporan hasil Pelayanan dan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
	Sasaran 1			
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	100%	Formulasi = Kecamatan dengan kelurahan : (25% X realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik) + (25% X realisasi program pemberdayaan masyarakat) + (25% X realisasi program trantibum) + (25% X realisasi program pemerintahan Umum Type Perhitungan = Progres Positif Sumber data = Laporan hasil kinerja pelayanan
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3,71	Formulasi = Nilai IPP Type Perhitungan = Progres Positif Sumber data = Laporan hasil evaluasi IPP
	Sasaran 2			
3	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	83,92	Formulasi = Hasil evaluasi SAKIP Type Perhitungan = Progres positif Sumber Data = Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
		Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	3,35	Formulasi = Hasil evaluasi SPIP Type Perhitungan = Progres Positif Sumber Data = Laporan Hasil Evaluasi SPIP
	Program			
4	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	Formulasi = Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Type Perhitungan = Progres positif Sumber Data = Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
5	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100%	Formulasi = (Jumlah gangguan trantibumlinmas yang ditangani dibagi Jumlah gangguan trantibumlinmas yang terjadi) dikali 100% Type Perhitungan = Progres Positif Sumber Data = Laporan penanganan gangguan trantibumlinmas

6	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	Formulasi = Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Type Perhitungan = kumulatif Sumber Data = Laporan hasil pemberdayaan masyarakat
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100%	Formulasi = Persentase penyelesaian pekerjaan atas inisiasi pekerjaan yang ada (Urusan penugasan yang dilaksanakan dibagi urusan penugasan yang direncanakan dikali 100) Type Perhitungan = Progres Positif Sumber Data = Laporan pelaksanaan urusan yang ditugaskan

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PEYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 5.237.500	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 6.107.875	APBD
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.397.686.037	APBD,DAU
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 19.250.000	APBD
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 9.772.261.185	APBD
	JUMLAH ANGGARAN	Rp 11.200.542.597	

Sumber: Perjanjian Kinerja tahun 2025 Perubahan

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Purwokerto Timur pada tahun 2025 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Anggaran Belanja Pemerintah Daerah TA 2025 Kecamatan Purwokerto Timur sebesar Rp 12.025.097.515. Kemudian dengan adanya Instruksi Bupati Banyumas Nomor 900.1/1 tentang pelaksanaan kegiatan dan efisiensi belanja tahun anggaran 2025 dimana efisiensi belanja sebesar 75% dari pagu induk untuk kelompok belanja:

- Belanja perjalanan dinas;
- Belanja makan minum;
- Belanja publikasi;
- Belanja narasumber dan honorarium tim;
- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor;
- Belanja pemeliharaan pada ketatausahaan

Jumlah Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Perubahan (APBD-P) Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas sebesar Rp

11.200.542.597,- Adapun komposisi belanja untuk masing-masing program, sebelum dan sesudah perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Anggaran Belanja Sebelum dan Sesudah Perubahan
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No.	Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.864.947.515	9.772.261.185
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.609.100	3.402.275
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.239.422.515	7.644.111.919
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	710.121.162	535.622.125
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	198.107.500	59.300.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.453.312.238	1.373.891.866
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.375.000	155.933.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.000.000	6.107.875
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000	1.250.000
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	20.000.000	4.857.875
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.070.150.000	1.397.686.037
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.065.150.000	1.396.436.037
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5.000.000	1.250.000
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	48.500.000	19.250.000
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	48.500.000	19.250.000
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.500.000	5.237.500
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.500.000	5.237.500
JUMLAH		12.025.097.515	11.200.542.597

Sumber : SIPD Penatausahaan APBD Perubahan Kecamatan Purwokerto Timur, 2025

Dari tabel tersebut diatas, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas memiliki anggaran perubahan APBD-P Tahun 2025 sebesar Rp 11.200.542.597,- Anggaran ini tersebar dan terinci kedalam anggaran 6 Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Purwokerto Timur dengan rincian pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan APBD-P

Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No.	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Outcome/output	Target Kinerja
	KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	7.972.818.856	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.402.275	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.352.275	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.050.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.524.061.919	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.496.581.919	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/Bulan
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.480.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.928.730	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.465.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.155.664	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket
a	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.141.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.688.166	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
a	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.261.700	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket
b	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.242.200	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan
a	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.975.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.800.000	Persentase Pengadaan Barang	100%
a	Pengadaan Mebel	0	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.800.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.145.932	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.410.824	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.735.108	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.480.000	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.200.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit
b	Pemeliharaan Mebel	0	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.280.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	1 Unit
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.107.875	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 Indeks
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.250.000	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100%

a	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.250.000	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.857.875	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%
a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.357.875	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan
b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.500.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.707.125	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	14.457.125	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2.865.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga
b	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11.592.125	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/Ormas
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.250.000	Persentase fasilitasi kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100%
a	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	1.250.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.250.000	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100%
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.250.000	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100%
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19.250.000	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 Laporan
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.237.500	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.237.500	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	100%
a	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan nasional	300.000	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitas Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25 Orang
b	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan bangsa	375.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	25 Orang
c	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	1.500.000	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan antar Suku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan, Lokal, regional dan Nasional	30 Orang
d	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.062.500	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen
	TOTAL	8.019.121.356		
	PURWOKERTO WETAN			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	281.865.676	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.900.000	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.900.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.265.200	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.848.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.694.500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.531.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket

d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.871.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.320.700	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	Persentase Pengadaan Barang	100%
a	Pengadaan Mebel	0	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.256.476	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.090.700	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.665.776	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.444.000	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.274.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit
b	Pemeliharaan Mebel	0	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.620.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	1 Unit
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.550.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	0 Unit
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	238.750.000	Persentase pemberdayaan masyarakat desa kelurahan	100%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	238.750.000	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	3.750.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan
b	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35.000.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/Ormas
c	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	200.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit
	TOTAL	520.615.676		
	ARCAWINANGUN			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	323.778.408	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.050.000	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.050.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.676.608	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	400.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.732.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.352.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.072.208	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket

e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.118.500	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.900	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	Persentase Pengadaan Barang	100%
a	Pengadaan Mebel	0	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.946.800	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.881.692	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.065.108	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.105.000	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.075.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit
b	Pemeliharaan Mebel	0	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.030.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	1 Unit
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	0 Unit
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	221.467.500	Persentase pemberdayaan masyarakat desa kelurahan	100%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	221.467.500	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	3.850.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan
b	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17.617.500	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas
c	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	200.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit
	TOTAL	545.245.908		
	KRANJI			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	318.944.708	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.900.000	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16.900.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.407.800	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	681.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.087.800	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	886.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.376.900	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.374.200	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket

f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.900	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.000.000	Persentase Pengadaan Barang	100%
a	Pengadaan Mebel	0	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.156.908	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.091.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.065.108	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.480.000	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.420.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit
b	Pemeliharaan Mebel	0	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.060.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	0 Unit
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	0 Unit
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	246.000.000	Persentase pemberdayaan masyarakat desa kelurahan	100%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	246.000.000	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2.000.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan
b	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	24.000.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas
c	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	200.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit
	(Pokir tenda)	20.000.000		
	TOTAL	564.944.708		
	MERSI			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	263.486.901	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.900.000	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.900.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.119.625	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	944.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.986.450	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.916.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.260.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.013.175	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan

3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	Persentase Pengadaan Barang	100%
a	Pengadaan Mebel	0	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.751.276	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.185.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.065.776	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.716.000	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.846.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit
b	Pemeliharaan Mebel	0	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.870.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	1 Unit
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	0 Unit
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	228.430.000	Persentase pemberdayaan masyarakat desa kelurahan	100%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	228.430.000	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	1.700.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan
b	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	26.730.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas
c	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	200.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit
	TOTAL	491.916.901		
	PURWOKERTO LOR			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	319.737.808	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.400.000	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.400.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.969.950	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.668.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.081.250	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.647.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.573.700	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.500.000	Persentase Pengadaan Barang	100%

a	Pengadaan Mebel	0	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.847.858	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.782.750	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.065.108	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.020.000	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.580.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit
b	Pemeliharaan Mebel	0	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.440.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	1 Unit
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	0 Unit
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	223.481.112	Persentase pemberdayaan masyarakat desa kelurahan	100%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	223.481.112	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2.000.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan
b	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21.481.112	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas
c	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	200.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit
TOTAL		543.218.920		
SOKANEGARA				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	291.628.828	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.900.000	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.900.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.254.212	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.790.800	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.543.500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.508.012	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.410.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.900	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	Persentase Pengadaan Barang	100%
a	Pengadaan Mebel	0	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit

c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.786.616	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.887.952	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.398.664	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.688.000	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.999.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit
b	Pemeliharaan Mebel	0	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.880.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.809.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	1 Unit
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	2 Unit
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	223.850.300	Persentase pemberdayaan masyarakat desa kelurahan	100%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	223.850.300	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	3.050.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan
b	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.800.300	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/ Ormas
c	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	200.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit
	TOTAL	515.479.128		

Sumber: SIPD-Ri Renja Kecamatan Purwokerto Timur, 2025

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2025 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas melaksanakan 5 (lima) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub kegiatan yang tersebar di Kecamatan dan 6 (enam) Kelurahan. yang tertuang dalam Dokumen Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 32)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2025. Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Indikator Kinerja Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Renstra Tahun 2024-2026 sebanyak 1 Tujuan dengan 1 indikator kinerja dan 2 Sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja. Pada Renja Perubahan 2025 Indikator kinerja Kecamatan Purwokerto Timur menjadi 1 Tujuan dengan 1 indikator kinerja, 2 sasaran dengan 4 indikator kinerja.

Adapun capaian indikator kinerja Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025 menunjukan hasil seperti pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Tujuan/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Keterangan
Tujuan 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas						
1	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100%	105,04	105,04	Tercapai
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan						
1	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100%	105,64	105,64	Tercapai
2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Angka	3,71	4,07	109,7	Tercapai

Sasaran 2						
Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan						
1	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	83,92	82,20	97,95	Tidak Tercapai
2	Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Nilai	3,35	3,419	102,06	Tercapai
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89	94,25	105,9	Tercapai
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum						
1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas	%	100	125	125	Tercapai
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
1	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	95,83	95,83	Tidak tercapai
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
1	Persentase Pelaksanaan Urusan yang ditugaskan	%	100	95,83	95,83	Tidak Tercapai
	Rata-Rata Capaian				104,77	Tercapai

Sumber: E-Monev Kecamatan Purwokerto Timur, 2025

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa tingkat Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan sebesar 105,04%.

Capaian kinerja Pelayanan pemerintah Kecamatan sebesar 105,64%. Capaian Nilai IPP sebesar 115,95%.

Realisasi Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan Tahun 2025 sebesar 82,20 dari target 83,92 dengan capaian 97,95% yang artinya tidak tercapai. Capaian Nilai maturitas SPIP sebesar 102,6%. Indeks IKM tahun 2025 (emonev) sebesar 94,25 dari target indeks 89,25 dengan capaian 105,9%.

Capaian indikator kinerja program yang belum tercapai adalah Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan baru tercapai 95,83% dan Persentase Pelaksanaan Urusan yang ditugaskan tingkat capaian 95,83%. Rata-rata capaian kinerja tahun 2025 sebesar 104,77%.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Perbandingan antara terget dan realisasi indikator kinerja tujuan:
 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang Berkualitas tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025				
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	%	100%	105,04	105,04

Sumber : E-Monev Kecamatan Purwokerto Timur, 2025

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Purwokerto Timur tahun 2025 untuk indikator Tujuan, persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah kecamatan tercapai 105,04% dari target 100%, dengan formulasi:

Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Kecamatan

= 50%*Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan + 50%*Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan

= (50% x 110,795%)+ (50% x 100,005%)

= 105,04%

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan optimal didukung oleh peningkatan kinerja aparatur, pemanfaatan sumber daya yang efisien serta monitoring dan evaluasi yang lebih baik.

b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 2 tahun sebelumnya.

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan yang Berkualitas tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Dua Tahun Sebelumnya Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas				
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023				
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah kecamatan	%	100	100,08	100,08
Tahun 2025				
Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah kecamatan	%	100	105,04	105,04

Sumber : E-Monev Kecamatan Purwokerto Timur, 2023-2025

Pada tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa indikator Kinerja tujuan tahun 2023 adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Sedangkan Indikator kinerja tujuan pada tahun 2024 dan tahun 2025 adalah Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah kecamatan dengan capaian 105,04% sehingga dengan tahun 2023 tidak bisa dibandingkan. Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2025 maka capaian kinerja sudah mencapai 100%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra
Perbandingan realisasi indikator tujuan: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan yang Berkualitas tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100%	105,04%	105,04%	100%	105,04%

Sumber; E-Monev Kecamatan Purwokerto Timur, 2025

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator tujuan Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan sebesar 105,04% dari target 100%. Capaian ini sudah melebihi target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sudah optimal dan berkualitas.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional,
Provinsi dan Kabupaten
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	105,04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: E-Monev Kecamatan Purwokerto Timur, 2025

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebesar 105,04% namun tidak ada informasi yang tersedia (N/A) mengenai standar nasional, provinsi Jawa Tengah, serta Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap dan Kebumen.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target adalah:

1. Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan maupun kinerja kecamatan sudah dijalankan dengan baik dengan mengoptimalkan SDM maupun sarana dan prasarana yang ada.
2. Secara rutin melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan serta layanan yang diberikan, mengidentifikasi kendala dan segera melakukan perbaikan.
3. Implementasi SAKIP melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja yang transparan serta berbasis data.
4. Kolaborasi dengan Kepolisian, Satpol PP dan masyarakat serta tokoh agama dalam menangani gangguan ketertiban dan keamanan lingkungan.
5. Pemanfaatan anggaran secara optimal dengan memastikan program berjalan sesuai sasaran serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
6. Koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan, kelurahan serta instansi terkait dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan publik.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah:

Bahwa dalam pencapaian target tidak ada kendala atau hambatan, tetapi akan tetap diadakan evaluasi rutin dalam rangka tetap fokus dalam pencapaian target. Faktor-faktor keberhasilan sudah tercantum diatas.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber dana yang dialokasikan untuk Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas setelah perubahan adalah sebesar Rp 10.200.542.597 dengan rincian Belanja Operasi Rp 10.083.598.411,00,- dan Belanja Modal Rp 1.116.944.186,00

Realisasi penggunaan sumber dana tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp 9.117.376.274,- atau penggunaan sebesar 81,40% sehingga ada efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 2.083.166.323 atau 18,60%.

Selama tahun 2025 kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

1. Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
2. Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025;
3. Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja;
4. Melakukan refocussing, pergeseran maupun perubahan anggaran atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi Anggaran
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Awal /Induk 2025 (Rp)	Anggaran Akhir/Perubahan 2025 (Rp)	Selisih (Rp)	Efisiensi (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.864.947.515	9.772.261.185	-92.686.330	92.686.330
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.000.000	6.107.875	-18.892.125	18.892.125
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.070.150.000	1.397.686.037	-672.463.963	672.463.963
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	48.500.000	19.250.000	-29.250.000	29.250.000
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.500.000	5.237.500	-11.262.500	11.262.500
JUMLAH		12.025.097.515	11.200.542.597		824.554.918

Sumber: SIPD Penatausahaan, 2025

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan yang berkualitas antara lain:

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Realisasi Keuangan
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	121,76	9.772.261.185	7.709.679.391	78,89%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	105,9	6.107.875	5.667.987	92,80%
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	125	19.250.000	19.245.000	99,97%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	95,83	1.397.686.037	1.377.658.896	98,57%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	95,83	5.237.500	5.125.000	97,85%
JUMLAH					11.200.542.597	9.117.376.274	

Sumber: E-monev, SIPD, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas memperoleh capaian atas indikator kinerja sebesar 100% dan program/kegiatan tersebut dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian target kinerja OPD.

Keberhasilan pencapaian kinerja salah satunya dukungan program dan kegiatan. Penjelasan kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Tujuan dari Program ini adalah Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan terdiri atas 6(enam) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.772.261.185 (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 7.709.679.391 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 78,89%.

Terdapat kegiatan pada Kecamatan dan Kelurahan di Purwokerto Timur yang tidak diambil/tidak dianggarkan karena keterbatasan anggaran yaitu kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

Alokasi anggaran terbesar ada pada anggaran penyediaan gaji dan tunjangan ASN dimana banyak pegawai yang mutasi dan pensiun dan belum ada gantinya sehingga banyak posisi jabatan yang kosong.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik. Terdiri dari 2 (dua) kegiatan, 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp 6.107.875 (enam juta seratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 5.667.987 (lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 92,80%.

- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program ini bertujuan Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan. Terdiri atas 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) sub kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp 19.250.000 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 19.245.000 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 99,97%
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program ini bertujuan untuk Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp 1.397.686.037 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 1.377.658.896 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilang puluh enam rupiah) dengan tingkat capaian 98,57%.
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Tujuan dari program ini adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.237.500 (lima juta dua ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 5.125.000 (lima juta seratus dua puluh lima rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 97,85%.

2. Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan

- a. Perbandingan antara target kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun 2025
Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah kecamatan tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.8 Sebagai berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100%	105,64%	105,64%
		Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,71	4,07	109,7%

Sumber: e-Monev Kecamatan Purwokerto Timur, 2025

Tahun 2025 renja perubahan terdapat penambahan indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik.

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Purwokerto Timur tahun 2025 untuk indikator Sasaran, Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan tercapai 105,64% dari target 100%, dengan formulasi:

Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan

$$= 25\% \times \text{realisasi program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik} + (25\% \times \text{program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan}) + (25\% \times \text{program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum}) + (25\% \times \text{program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum})$$

$$= (25\% \times 105,9\%) + (25\% \times 95,83\%) + (25\% \times 125\%) + (25\% \times 95,83\%)$$

$$= 105,64\%$$

Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program berjalan optimal dengan didukung peningkatan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya, anggaran yang lebih efisiensi serta perencanaan dan evaluasi yang baik.

Indek Pelayanan Publik berperan dalam membangun pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 Kecamatan Purwokerto Timur mendapat nilai sebesar 4,07 dengan tingat capaian 109,7% dari target 3,71 yang artinya Kecamatan Purwokerto Timur telah menyediakan layanan publik yang berkualitas transparan dan akuntabel

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.9 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan Tahun 2025
dengan Dua Tahun Sebelumnya
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023				
Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	N/A	N/A	NA
Indeks Pelayanan Publik	Angka	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	100,355	100,355
Indeks Pelayanan Publik	Angka	N/A	N/A	N/A
Tahun 2025				
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	105,64	105,64
Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,71	4,07	109,7

Sumber : *E-Monev Kecamatan Purwokerto Timur, 2023-2025*

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Sasaran tahun 2023 adalah Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu sehingga tidak bisa dibandingkan. Indikator kinerja sasaran tahun 2024 adalah Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan dengan capaian 100,355% Indikator kinerja sasaran tahun 2025 dengan capaian 105,64 % lebih tinggi dari pada tahun 2024. Tahun 2025 terdapat tambahan indikator sasaran Indeks Pelayanan Publik Kecamatan dimana target angka 3,71 dengan realisasi angka 4,07 dengan tingkat capaian 109,7% Hal ini dipengaruhi:

1. Peningkatan kompetensi pegawai dalam memberikan layanan seHINGga meningkatkan kepuasan masyarakat;
 2. Adanya monitoring terhadap proses pelayanan;
 3. Peningkatan koordinasi antar unit kerja dalam penyelesaian layanan
- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra.

Perbandingan realisasi indikator sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan target akhir Renstra ditampilkan pada tabel 3.10 Sebagai berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan Tahun 2025
dengan Target Renstra
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100%	105,64%	105,64%	100%	105,64%
C	Angka	3,71	4,07	109,7	3,51	115,95

Sumber; E-Monev Kecamatan Purwokerto Timur, 2025

Pada tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator sasaran Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan sebesar 105,64% dari target 100%. Capaian ini sudah melebihi target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas. Dan capaian kinerja indikator sasaran indeks pelayanan publik kecamatan sebesar 4,07 dari target 3,71. Hal ini juga menunjukkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)
 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten seperti yang ditampilkan pada tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional,
Provinsi dan Kabupaten
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provin si Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	105,64%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indeks Pelayanan Publik	4,07	N/A	4,72	3,72	4,50	4,66	4,33

Sumber: E-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja sasaran Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan sebesar 105,64%. namun ada beberapa informasi yang

tidak tersedia (N/A) mengenai standar nasional, provinsi Jawa Tengah, serta Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap dan Kebumen.

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan.

Penyebab Keberhasilan dalam pencapaian target adalah:

1. Penyelenggaraan pemerintahan, kinerja pelayanan maupun kinerja kecamatan sudah dijalankan dengan baik dengan mengoptimalkan SDM maupun sarana dan prasarana yang ada;
2. Secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan serta layanan yang diberikan, mengidentifikasi kendala dan segera melakukan perbaikan.
3. Sinergi dengan berbagai pihak seperti dari pemerintah daerah, kelurahan dan masyarakat turut mendukung pencapaian target yang ditetapkan.
4. Kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan kecamatan yang lebih baik turut mendorong peningkatan capaian kinerja terutama dalam aspek pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah:

Bahwa dalam pencapaian target tidak ada kendala atau hambatan, tetapi akan tetap diadakan evaluasi rutin dalam rangka tetap fokus dalam pencapaian target. Faktor-faktor keberhasilan sudah tercantum diatas.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama tahun 2025 kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

1. Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
2. Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang ada yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025;

- Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja;
- Melakukan refocussing, pergeseran maupun perubahan anggaran atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.12
Efisiensi Anggaran pada capaian kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Awal /Induk 2025 (Rp)	Anggaran Akhir/ Perubahan 2025 (Rp)	Selisih (Rp)	Efisiensi
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.000.000	6.107.875	18.892.125	18.892.125
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	48.500.000	19.250.000	29.250.000	29.250.000
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.070.150.000	1.397.686.037	672.463.963	672.463.963
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.500.000	5.237.500	11.262.500	11.262.500

Sumber: SIPD Penatausahaan, 2025

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan antara lain:

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Realisasi Keuangan pada
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi capaian Kinerja	Realisasi Keuangan (Rp)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	100	5.667.987
1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	100	1.018.500
1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintathan yang dilimpahkan kepada camat	%	137,5	4.649.487
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	125	19.245.000

2.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	%	125	19.245.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	95,83	1.377.658.896
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	91,66	1.376.713.896
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase fasilitasi kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	%	100	945.000
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	95,83	5.125.000
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	%	95,83	5.125.000

Sumber: E-Monev Kecamatan Purwokerto Timur, 2025

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik. Terdiri dari 2 (dua) kegiatan, 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp 6.107.875,- (enam juta seratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 5.667.987,- (lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah)dengan tingkat capaian sebesar 92,80%.
- 2) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini bertujuan Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan. Terdiri atas 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) sub kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp 19.250.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 19.245.000,- (sembilan belas juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 99,97%.
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp 1.397.686.037,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam tiga puluh tujuh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 1.377.658.896,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan tingkat capaian 98,57%.
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Tujuan dari program ini adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.237.500,- (lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 5.125.000,- (lima juta sertus dua puluh lima ribu rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 97,85%.

3. Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan

- a. Perbandingan antara target kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran: Meningkatnya Akutabilitas Pemerintah kecamatan tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.14 Sebagai berikut:

Tabel 3.14
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Akutabilitas Pemerintah Kecamatan Tahun 2025
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	83,92	82,2	97,95
Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Nilai	3,35	3,419	102,06

Sumber: E-Monev kecamatan Purwokerto Timur, 2025

Pada tahun 2025 renja perubahan terdapat penambahan indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP Kecamatan.

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja ke 1 yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Purwokerto Timur tahun 2025 adalah sebesar 97,95%. Sedangkan rata-rata capaian kinerja ke 2 yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Purwokerto Timur tahun 2025 adalah sebesar 102,06%

Realisasi capaian kinerja Kecamatan Purwokerto Timur tahun 2025 untuk indikator Sasaran, Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan sebesar 82,20 dari target nilai 83,92 dengan capaian 97,95%. Hal ini menunjukkan bahwa target nilai SAKIP Tahun 2025 tidak tercapai. Dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2025 masih terdapat kelemahan pada dokumen perencanaan yang disusun. Secara kualitas dan formalitas dokumen pelaporan kinerja telah disusun namun informasi yang dilaporkan belum digunakan sebagai bahan perencanaan berikutnya.

Hasil evaluasi SAKIP terhadap Kecamatan Purwokerto Timur telah disampaikan ke Kecamatan Purwokerto Timur melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pada bulan Agustus 2025. Evaluasi dilakukan terhadap 5 (Lima) Komponen besar manajemen kinerja dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.15
Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2025
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024	Nilai 2025
a	Perencanaan Kinerja	30,00	25,20	25,20
b	Pengukuran Kinerja	30,00	25,50	25,50
c	Pelaporan Kinerja	15,00	13,05	12,75
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,00	18,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	83,75	82,20
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Sumber: LHE SAKIP Inspektorat, 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2025 pada Kecamatan Purwokerto Timur mendapatkan nilai 82,20 dengan predikat “Memuaskan”. Nilai SAKIP Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1,55 dari tahun 2024. Penurunan terjadi pada komponen pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang kurang memadainya kualitas pelaporan dan evaluasi.

Tabel 3.16
Hasil Penjaminan Kualitas atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Tahun 2025
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

No.	Komponen Penilaian	Penjaminan Kualitas 2024		Penjaminan Kualitas 2025	
		Level	Skor	Level	Skor
1	Pencapaian Tujuan	-	1,600	-	1,600
2	Struktur dan Proses	-	0,790	-	0,904
3	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	-	0,960	-	0,915
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,350	3	3,419

Realisasi capaian kinerja Kecamatan Purwokerto Timur tahun 2025 untuk indikator Nilai Maturitas SPIP kecamatan sebesar 3,419 dari target nilai 3,35 dengan capaian 102,06%. Nilai ini berada pada level 3 atau “terdefinisi”. Hal ini menunjukkan bahwa target nilai Maturitas SPIP kecamatan Tahun 2025 tercapai, hal ini menunjukkan bahwa kecamatan Purwokerto Timur telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian

kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif dan dari hasil Laporan Evaluasi Pemeriksaan masih terdapat kelemahan pada komponen penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu pada komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses serta Pencapaian Tujuan.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 s.d 2025 ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.17
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Dua Tahun
Sebelumnya
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023				
Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	100
Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Nilai	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	83,9	83,75	99,82
Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Nilai	N/A	N/A	N/A
Tahun 2025				
Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	83,92	82,2	97,95
Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Nilai	3,35	3,419	102,06

Sumber: E-Monev kecamatan Purwokerto Timur, 2025

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka rata-rata capaian kinerja ke 1 yang tercantum pada Perjanjian kinerja Kecamatan Purwokerto Timur tahun 2025 adalah sebesar 97,95% menurun dari capaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 99,82%. Sedangkan rata-rata capaian kinerja ke 2 yang tercantum pada Perjanjian Kinerja kecamatan Purwokerto Timur tahun 2025 adalah sebesar 102,06. Nilai SAKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik) dihitung dengan menjumlahkan nilai perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Sedang Nilai SPIP dihitung dengan menjumlahkan Komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra.

Perbandingan realisasi indikator sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan target akhir Renstra ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra
Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	83,92	82,20	97,95	83,95	97,92
Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Nilai	3,35	3,419	102,06	3,35	102,06

Sumber; E-Monev Kecamatan Purwokerto Timur, 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka capaian kinerja ke 1 tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir renstra adalah sebesar 97,92%. Sedangkan capaian kinerja ke 2 tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir renstra adalah sebesar 102.06%.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.19 sebagai berikut :

Tabel 3.19
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025
Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan dengan Standar Nasional,
Provinsi dan Kabupaten
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	82,20	64,89	84,30	68,29	64,2	74,59	N/A
Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	3,419	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: E-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian indikator kinerja ke 1 di Kecamatan Purwokerto Timur Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa realisasi Nilai SAKIP mencapai 97,95%. Sedangkan capaian indikator kinerja ke 2 mencapai 102,06%. Namun ada beberapa informasi yang tersedia (N/A) mengenai standar nasional, provinsi Jawa Tengah, serta

Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap dan Kebumen karena ketiadaan data.

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian target kinerja , serta solusi yang dilakukan
- Penyebab kegagalan dalam pencapaian target indikator nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan adalah:
 1. Perencanaan kinerja belum tersusun dengan baik, indikator kinerja belum seluruhnya SMART. Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan dokumen kinerja yang ditetapkan belum memadai
 2. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala, namun hasil pengukuran kinerja belum seluruhnya didukung data yang dapat diandalkan.
 3. Pelaporan kinerja belum mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja
 4. Evaluasi kinerja belum sepenuhnya berkualitas dan memberi dampak signifikan terhadap peningkatan implementasi SAKIP.
 - Penyebab Keberhasilan dalam pencapaian target indikator nilai Nilai Maturitas SPIP Kecamatan adalah:
 1. Lingkungan pengendalian sebagai modal awal penerapan SPIP sudah dibangun secara optimal.
 2. Identifikasi dan analisis risiko sudah dilaksanakan secara memadai.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target:

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas melaksanakan hasil rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dengan :

1. Melakukan perbaikan implementasi SAKIP pada komponen perencanaan kinerja dengan menyusun SOP perencanaan dan penganggaran.
2. Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen pengukuran kinerja dengan melakukan penyesuaian/retargeting.
3. Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen pelaporan dengan memastikan informasi dalam LkjIP harus dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan perencanaan periode berikutnya termasuk penganggaran, evaluasi dan

- perubahan budaya kinerja.
4. Melakukan analisis terhadap permasalahan nyata yang dihadapi dalam implementasi SAKIP dan merumuskan solusi perbaikan yang terukur, serta efektif dalam mengatasi permasalahan.
 5. Melakukan reviu indikator dan target kinerja.
 6. Menyusun Kertas Kerja untuk menjelaskan seluruh indikator kinerja.
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Selama tahun 2025 kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :
1. Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
 2. Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
 3. Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja.
 4. Melakukan refocussing, pergeseran maupun perubahan anggaran atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Tahun 2025 pada program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota terdapat refocusing dan perubahan anggaran terutama pada anggaran Gaji dan tunjangan serta kegiatan kegiatan rutin lainnya dan diperoleh anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.20
Efisiensi Anggaran
Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Awal /Induk 2025 (Rp)	Anggaran Akhir/Perubahan 2025 (Rp)	Selisih (Rp)	Efisiensi
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.864.947.515	9.772.261.185	92.686.330	92.686.330

Sumber: SIPD Penatausahaan, 2025

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran : Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan antara lain:

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Realisasi Keuangan
Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	121,756	9.772.261.185	7.709.679.391	78,89%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	150	3.402.275	3.402.000	99,99%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	105,77	7.644.111.919	5.665.251.693	74,11%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	%	99,77	535.622.125	504.217.736	94,14%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	%	175	59.300.000	55.697.900	93,93%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	%	100	1.373.891.866	1.337.353.771	97,34%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	155.933.000	143.756.291	92,19%

Sumber: E-Monev Kecamatan Purwokerto Timur, 2025

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan ini bertujuan Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp

3.402.275,-(tiga juta empat ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 3.402.000,-(tiga juta empat ratus dua ribu rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 99,99%.

2). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan terselenggaranya administrasi keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.644.111.919,- (tujuh milyar enam ratus empat puluh empat juta seratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 5.665.251.693,- (lima milyar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 74,11%.

3). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri atas 6 (enam) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 535.622.125,- (lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 504.217.736,- (lima ratus empat juta dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 94,14%

4). Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas (2) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 59.300.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 55.697.900,- (lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 93,93%

5). Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.373.891.866,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dengan realisasi sebesar

- Rp 1.337.353.771,-(satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 97,34%.
- 6). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini bertujuan Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 155.933.000,- (seratus lima puluh lima juta sembilan puluh tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 143.756.291,- (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 92,19%.

4. Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik

- a. Perbandingan antara target kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun 2025
- Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja program: Indeks Kepuasan Masyarakat ditampilkan pada tabel 3.22 Sebagai berikut:

Tabel 3.22
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89	94,25	105,9

Sumber: E-Monev Kecamatan Purwokerto Timur, 2025

- Hasil survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 TW 4 diperoleh nilai capaian 94,25 atau kategori Sangat Baik (A) dengan capaian 105,9%. Hasil ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.23 sebagai berikut :

Tabel 3.23
Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Tahun 2025 dengan Dua Tahun Sebelumnya
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

Indeks IKM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Tahun 2023	Indeks	86	88,05	102,38
Tahun 2024	indeks	88	89,25	101,42
Tahun 2025 TW 4	indeks	89	94,25	105,9

Sumber : e-monev Kecamatan Purwokerto Timur, 2022-2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi indeks IKM dari tahun 2023 sampai dengan 2025 mengalami kenaikan.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra.

Perbandingan realisasi indikator sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan tahun 2025 dengan target akhir Renstra ditampilkan pada tabel 3.24 Sebagai berikut :

Tabel 3.24
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi Tw 4	%		
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89	94,25	105,9	90	104,72

Sumber: E-Monev Kecamatan Purwokerto Timur, 2025

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2025 TW IV sebesar 94,25 dari target indeks 89 dengan capaian 105,9%. Target akhir renstra tahun 2026 sebesar 90 dengan persentase kinerja renstra sampai dengan tahun 2025 sebesar 104,72.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.25 sebagai berikut :

Tabel 3.25
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Program
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provin si Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Indeks Kepuasan Masyarakat	94,25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: E-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi capaian indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Purwokerto Timur kabupaten Banyumas tahun 2025 sebesar 94,25 namun tidak ada informasi yang tersedia (N/A) mengenai standar nasional, provinsi Jawa Tengah, serta Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap dan Kebumen.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian target kinerja , serta solusi yang dilakukan

Penyebab Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja adalah:

1. Prosedur pelayanan yang baik berupa kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
2. Persyaratan pelayanan yang jelas meliputi persyaratan teknis dan administatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
3. Kejelasan petugas pelayanan meliputi keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggungjawabnya).
4. Kedisiplinan petugas pelayanan terkait dengan kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Kecepatan pelayanan yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
6. Keadilan pelayanan yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayani.
7. Kesopanan petugas pelayanan meliputi sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
8. Adanya kepastian biaya pelayanan : tidak dipungut biaya (gratis)
9. Adanya kepastian jadwal pelayanan yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
10. Adanya kenyamanan lingkungan meliputi kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima layanan.
11. Adanya keamanan layanan meliputi terjaminnya tingkat keamanan lingkungan ataupun sarana yang digunakan.

12. Adanya program atau inovasi pelayanan PELAS CAMPUR, dimana masyarakat bisa melakukan permohonan pelayanan administrasi kependudukan pada malam hari.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target:

Bahwa dalam pencapaian target kinerja tidak ada kendala atau hambatan sehingga tidak perlu ada solusi yang dilakukan, faktor faktor keberhasilan sudah tercantum diatas.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

1. Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
2. Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
3. Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
4. Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.26
Efisiensi Anggaran
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Awal /Induk 2024 (Rp)	Anggaran Akhir/Perubahan 2024 (Rp)	Selisih (Rp)	Efisiensi
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.000.000	6.107.875	-18.892.125	18.892.125

Sumber: SIPD Penatausahaan APBD Perubahan, 2025

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja untuk Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik antara lain:

Tabel 3.27
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Realisasi Keuangan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan %
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	105,9	Rp 6.107.875	Rp 5.667.987	92,80%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100	Rp 1.250.000	Rp 1.018.500	81,48%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	137	Rp 4.857.875	Rp 4.649.487	95,71%

Sumber: E-Monev Kecamatan Purwokerto Timur, SIPD Penatausahaan, 2025

- 1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 1.018.500,- (satu juta delapan belas ribu lima ratus rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 81,48%.

- 2) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.857.875,- (empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 4.649.487,- (empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 95,71%.

5. Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a. Perbandingan antara target kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja program: Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ditampilkan pada tabel 3.28 Sebagai berikut:

Tabel 3.28
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	95,83	95,83

Sumber : E-Monev Kecamatan Purwokerto Timur, 2025

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator kinerja Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 95,83% dari target 100%. Dengan formulasi Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dibagi Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan. Kegiatan meliputi Kegiatan Pemberdayaan kelurahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan dengan rumus:

= 91,66% + 100% / 2 = 95,83%

Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan belum optimal.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.29 sebagai berikut :

Tabel 3.29
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Dua Tahun Sebelumnya
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023				
Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100

Tahun 2025				
Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	95,83	95,83

Sumber: E-Monev Kecamatan Purwokerto Timur, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 indikator kinerja program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah Persentase kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sementara pada tahun 2024 dan tahun 2025 indikator kinerja program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan adalah Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Tahun 2024 dengan realisasi 100% dari target 100% sementara tahun 2025 mengalami penurunan dengan realisasi 95,83% dengan capaian 95,83% dari target 100%. Penurunan terjadi karena anggaran di refocusing sehingga kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat banyak mengalami pengurangan kegiatan.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tahun 2025 dengan target akhir Renstra ditampilkan pada tabel 3.30 Sebagai berikut :

Tabel 3.30
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks	100	95,83	95,83	100	95,83

Sumber; E-Monev Kecamatan Purwokerto Timur, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 95,83%. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2026 maka capaian kinerja 95,83%. Hal ini menunjukkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat kecamatan belum optimal.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.31 sebagai berikut :

Tabel 3.31
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

Indikator Kinerja	Realisasi %	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumeh
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	95,83	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: E-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel tersebut diatas realisasi indikator kinerja mencapai 95,83% namun tidak ada informasi yang tersedia (N/A) mengenai standar nasional, provinsi Jawa Tengah, serta Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap dan Kebumen.

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian target kinerja , serta solusi yang dilakukan

Penyebab kegagalan dalam pencapaian target kinerja adalah:

1. Adanya refocusing anggaran menyebabkan pengurangan kegiatan pembinaan masyarakat di kelurahan.
2. Adanya refocusing anggaran belum disertai perubahan/retargeting jumlah target kegiatan yang terkena refocusing.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target:

1. Untuk tahun berikutnya menganggarkan kembali kegiatan pembinaan masyarakat di kelurahan dimana kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah program/kegiatan prioritas.
2. Memperhatikan target kegiatan pada saat ada perubahan anggaran karena refocusing atau efisiensi anggaran.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama tahun 2025 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas pada program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdapat refocusing yang cukup banyak yang menyebabkan pengambilan kebijakan untuk mengurangi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mempertahankan kegiatan pengadaan baju linmas.

Tabel 3.32
Efisiensi Anggaran
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Awal /Induk 2025 (Rp)	Anggaran Akhir/Perubahan 2024 (Rp)	Selisih (Rp)	Efisiensi
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.070.150.000	1.397.686.037	672.463.963	672.463.963
	JUMLAH	2.070.150.000	1.397.686.037		

Sumber: SIPD Penatausahaan APBD Perubahan, 2025

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan antara lain:

Tabel 3.33
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Realisasi Keuangan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan %
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	95,83	1.397.686.037	1.377.658.896	98,57%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	91,66	1.396.436.037	1.376.713.896	98,59%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase fasilitasi kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	%	100	1.250.000	945.000	75,60%

Sumber: SIPD Penatausahaan, 2025

1). Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Pemberdayaan Kelurahan, terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.396.436.037,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 1.376.713.896,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 98,59%. Pada sub kegiatan ini terdapat kegiatan di Kelurahan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan dukungan pendanaan kelurahan sebesar Rp 200.000.000,- untuk pembangunan sarana dan prasarana

- kelurahan dan Rp 100.000.000,- Dana Kelurahan tambahan bersumber dari PAD untuk Pemberdayaan masyarakat di kelurahan untuk tiap kelurahan.
- 2) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
- Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatnya fasilitasi kecamatan dalam meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat, terdiri 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 75,60%.

6. Program: Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Perbandingan antara target kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun 2025
- Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja program: Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas ditampilkan pada tabel 3.34 Sebagai berikut:

Tabel 3.34
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	125	125

Sumber: E-Monev Kecamatan Purwokerto Timur, 2025

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.35 sebagai berikut :

Tabel 3.35
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Dua Tahun Sebelumnya
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023				
Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100

Tahun 2025				
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	125	125

Sumber: E-Monev Kecamatan Purwokerto Timur, 2025

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa indikator kinerja program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2023 adalah Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Sementara tahun 2024 dan tahun 2025 indikator kinerja program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum adalah persentase penanganan gangguan trantibumlinmas, tahun 2024 dengan realisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%. Tahun 2025 dengan realisasi 125% dari target 100% dengan capaian 125% . Hal ini menggambarkan bahwa pada Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka penurunan gangguan trantibumlinmas secara berkala dan melibatkan seluruh pihak terkait.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas tahun 2025 dengan target akhir Renstra ditampilkan pada tabel 3.36 Sebagai berikut :

Tabel 3.36
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2024
		Target	Realisasi	%		
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	125	125	100	125

Sumber; E-Monev Kecamatan Purwokerto Timur, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 125%. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2026 maka capaian kinerja sudah mencapai 125%. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dalam meningkatkan tingkat ketentraman dan ketertiban umum.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.37 sebagai berikut :

Tabel 3.37
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumeh
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	125	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: E-Monev kecamatan Purwokerto Timur, 2024

Capaian realisasi indikator kinerja sebesar 100% dan tidak ada pembanding (N/A) dari standar nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara Cilacap dan Kebumen.

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian target kinerja , serta solusi yang dilakukan

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target kinerja adalah:

1. Sinergitas yang baik antara Kepolisian, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan Purwokerto Timur
2. Melaksanakan rapat koordinasi FKDM secara rutin dengan kepolisian, TNI, instansi vertikal, LPMK, RT RW,tokoh agama, tokoh pemuda, Karang taruna, Linmas dan masyarakat agar selalu terjalin komunikasi yang baik dan lingkungan kondusif;
3. Adanya sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan Linmas.
5. Respon cepat dalam menangani laporan gangguan ketertiban dan keamanan.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target:

Bahwa dalam pencapaian target tidak ada kendala atau hambatan, tetapi akan tetap diadakan evaluasi rutin dalam rangka tetap fokus dalam pencapaian target. Faktor-faktor keberhasilan sudah tercantum diatas.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Selama tahun 2025 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdapat refocusing.

Tabel 3.38
Efisiensi Anggaran Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Awal /Induk 2025 (Rp)	Anggaran Akhir/Perubahan 2025 (Rp)	Selisih (Rp)	Efisiensi
1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	48.500.000	19.250.000	29.250.000	29.250.000
	JUMLAH	48.500.000	19.250.000		

Sumber: SIPD Penatausahaan, 2025

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas antara lain:

Tabel 3.39
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Realisasi Keuangan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan %
1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	125	19.250.000	19.245.000	99,97%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	%	125	19.250.000	19.245.000	99,97%

Sumber: SIPD Penatausahaan, 2025

- 1). Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatnya pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.250.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 19.245.000,- (sembilan belas dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 99,97%. Pada sub kegiatan ini dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan tujuan menjaring, menampung, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa

bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini.

7. Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Perbandingan antara target kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja program:
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan ditampilkan pada tabel 3.40 Sebagai berikut:

Tabel 3.40
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	95,83	95,83

Sumber: E-Monev Kecamatan Purwokerto Timur, 2025

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja realisasi 95,83%, hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum belum optimal.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.41 sebagai berikut :

Tabel 3.41
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Dua Tahun Sebelumnya
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023				
NA	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100
Tahun 2025				
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	95,83	95,83

Sumber: E-Monev Kecamatan Purwokerto Timur, 2025

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah program baru pada renstra 2024 – 2026. Tahun 2025 indikator kinerja program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

adalah Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan dimana target 100% dengan realisasi 95,83% dan capaian 95,83%. Hal ini menggambarkan bahwa pada Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara berkala namun belum optimal.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan tahun 2025 dengan target akhir Renstra ditampilkan pada tabel 3.42 Sebagai berikut :

Tabel 3.42
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	95,83	95,83	100	95,83

Sumber; E-Monev Kecamatan Purwokerto Timur, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 95,83%. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2026 maka capaian kinerja tidak mencapai 100%. Hal ini menunjukkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan belum optimal.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.43 sebagai berikut :

Tabel 3.43
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

Indikator Kinerja	Realisasi %	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	95,83	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: E-Monev Kecamatan Purwokerto timur, 2025

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian realisasi indikator kinerja sebesar 95,83% dan tidak ada informasi yang tersedia (N/A)

- mengenai standar nasional, provinsi Jawa Tengah, Kabupaten purbalingga, Kabupaten banjarnegara, Cilcap dan Kebumen.
- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian target kinerja , serta solusi yang dilakukan
- Penyebab kegagalan dalam pencapaian target kinerja antara lain:
1. Jumlah Peserta pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional tidak tercapai sesuai target.
 2. Keterbatasan anggaran karena adanya refocusing
- Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target:
- Melakukan retargeting setiap ada perubahan/pergeserah anggaran baik karena refocusing/efisiensi anggaran.
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Selama tahun 2025 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdapat refocusing.

Tabel 3.44

Efisiensi Anggaran

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Awal /Induk 2025 (Rp)	Anggaran Akhir/ Perubahan 2025 (Rp)	Selisih (Rp)	Efisiensi
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.500.000	5.237.500	11.262.500	11.262.500
	JUMLAH	16.500.000	5.237.500		

Sumber: SIPD Penatausahaan - APBD Perubahan, 2025

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan antara lain:

Tabel 3.45

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Realisasi Keuangan Tahun 2025

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan %
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	95,83	5.237.500	5.125.000	97,85%

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	%	95,83	5.237.500	5.125.000	97,85%
--	---	---	---	-------	-----------	-----------	--------

Sumber: SIPD Penatausahaan- APBD Perubahan, 2025

1). Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kegiatan ini bertujuan Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.237.500,- (lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 5.125.000,- (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 97,85%.

C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang dialokasikan untuk Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas setelah perubahan adalah sebesar Rp 11.200.542.597,- dengan realisasi penggunaan sumber dana tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp 9.117.376.274,- atau penggunaan sebesar 81,40% sehingga ada efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 2.083.166.323,- atau 18,60%.

Tabel 3.46
 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025
 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	Realisasi%	sisa%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	9.772.261.185	7.709.679.391	2.062.581.794	78,89%	0,00%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.402.275	3.402.000	275	99,99%	0,00%
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.352.275	2.352.000	275	99,99%	0,01%
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.050.000	1.050.000	-	100,00%	0,00%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.644.111.919	5.665.251.693	1.978.860.226	74,11%	0,00%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.496.581.919	5.524.571.693	1.972.010.226	73,69%	26,31%
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	147.530.000	140.680.000	6.850.000	95,36%	4,64%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	535.622.125	504.217.736	31.404.389	94,14%	5,86%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.796.800	15.704.668	92.132	99,42%	0,58%
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.281.164	74.429.485	2.851.679	96,31%	3,69%
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.826.000	20.415.339	410.661	98,03%	1,97%
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	360.423.286	338.787.444	21.635.842	94,00%	6,00%

e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.071.975	51.805.800	2.266.175	95,81%	4,19%
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.247.900	-	3.247.900	0,00%	100,00%
g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.975.000	3.075.000	900.000	77,36%	22,64%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.300.000	55.697.900	3.602.100	93,93%	6,07%
a	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.300.000	49.947.900	3.352.100	93,71%	6,29%
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	5.750.000	250.000	95,83%	4,17%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.373.891.866	1.337.353.771	36.538.095	97,34%	2,66%
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	218.331.218	192.003.781	26.327.437	87,94%	12,06%
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.500.000	31.500.000	2.000.000	94,03%	5,97%
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.122.060.648	1.113.850.490	8.210.158	99,27%	0,73%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.933.000	143.756.291	12.176.709	92,19%	7,81%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.394.000	58.779.500	9.614.500	85,94%	14,06%
b	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.180.000	29.215.000	965.000	96,80%	3,20%
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.809.000	39.557.500	1.251.500	96,93%	3,07%
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.550.000	16.204.291	345.709	97,91%	2,09%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.107.875	5.667.987	439.888	92,80%	7,20%
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.250.000	1.018.500	231.500	81,48%	18,52%
a	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.250.000	1.018.500	231.500	81,48%	18,52%
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.857.875	4.649.487	208.388	95,71%	4,29%
a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.357.875	2.224.487	133.388	94,34%	5,66%
b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.500.000	2.425.000	75.000	97,00%	3,00%
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.397.686.037	1.377.658.896	20.027.141	98,57%	1,43%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.396.436.037	1.376.713.896	19.722.141	98,59%	1,41%
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	19.215.000	18.405.100	809.900	95,79%	4,21%

b	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	157.221.037	154.261.046	2.959.991	98,12%	1,88%
c	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	1.220.000.000	1.204.047.750	15.952.250	98,69%	1,31%
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.250.000	945.000	305.000	75,60%	24,40%
a	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	1.250.000	945.000	305.000	75,60%	24,40%
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.250.000	19.245.000	5.000	99,97%	0,03%
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.250.000	19.245.000	5.000	99,97%	0,03%
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19.250.000	19.245.000	5.000	99,97%	0,03%
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
a	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.237.500	5.125.000	112.500	97,85%	2,15%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.237.500	5.125.000	112.500	97,85%	2,15%
a	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan nasional	300.000	300.000	-	100,00%	0,00%
b	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan bangsa	375.000	375.000	-	100,00%	0,00%
c	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	1.500.000	1.425.000	75.000	95,00%	5,00%
d	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.062.500	3.025.000	37.500	98,78%	1,22%
	JUMLAH	11.200.542.597	9.117.376.274	2.083.166.323	81,40%	18,60%

Sumber: SIPD Penatausahaan, 2025

Anggaran setelah perubahan sebesar Rp 11.200.542.597 dengan rincian : Kecamatan Purwokerto Timur sebesar Rp 8.019.121.356, Kelurahan Arcawinangun sebesar Rp 545.245.908,- Kelurahan Kranji sebesar Rp 564.944.708,- Kelurahan Mersi sebesar Rp 491.916.901,- Kelurahan Purwokerto Lor sebesar Rp 543.218.920,- Kelurahan Purwokerto Wetan sebesar Rp 520.615.676,- dan kelurahan Sokanegara sebesar Rp 515.479.128,- dengan rincian realisasi per belanja dapat dilihat pada tabel 3.47 berikut:

Tabel 3.47
Realisasi Anggaran Belanja
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Belanja Operasi	10.083.598.411	8.013.214.853	79,47%
	Belanja Pegawai	7.496.581.919	5.524.571.693	73,69%
	Belanja Barang dan Jasa	2.587.016.492	2.488.643.160	96,20%
2	Belanja Modal	1.116.944.186	1.104.161.421	98,86%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.110.000	126.559.899	96,53%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.994.186	97.198.491	99,19%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	849.340.000	842.213.737	99,16%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	38.500.000	38.189.294	99,19%
	Total	11.200.542.597	9.117.376.274	81,40%

Sumber: SIPD Penatausahaan, 2025

Adapun penjelasan dari tabel diatas adalah :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dengan pagu anggaran sebesar Rp 10.083.598.411,- (Sepuluh milyar delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan empat ratus sebelas rupiah) terealisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp 8.013.214.853,-(delapan milyar tiga belas juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) atau sebesar 79,47%. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp 9.392.080.602,- (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu enam ratus dua rupiah) atau sebesar 93,67 maka persentase realisasi anggaran tahun 2025 lebih rendah dari realisasi belanja tahun 2024.

2. Belanja Modal

Pagu anggaran belanja modal tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.116.944.186,- (satu milyar seratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dengan realisasi Rp 1.104.161.421,- (satu milyar seratus empat juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) atau sebesar 98,86%. Bila dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2024 sebesar Rp 1.312.126.809,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan rupiah) atau tercapai sebesar 96%, maka persentase realisasi anggaran tahun 2025 lebih tinggi dari realisasi belanja tahun 2024.

Berikut rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.48 dibawah ini.

Tabel 3.48
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dan 6 Kelurahan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	Realisasi%	sisa%
A	KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	7.972.818.856	5.982.817.019	1.990.001.837	75,04%	24,96%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.402.275	3.402.000	275	99,99%	0,01%
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.352.275	2.352.000	275	99,99%	0,01%
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.050.000	1.050.000	0	100,00%	0,00%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.524.061.919	5.552.051.693	1.972.010.226	73,79%	26,21%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.496.581.919	5.524.571.693	1.972.010.226	73,69%	26,31%
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.480.000	27.480.000	0	100,00%	0,00%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.928.730	103.582.193	9.346.537	91,72%	8,28%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.465.000	5.404.664	60.336	98,90%	1,10%
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.155.664	18.416.296	739.368	96,14%	3,86%
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.141.000	9.141.000	0	100,00%	0,00%
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.688.166	64.295.233	4.392.933	93,60%	6,40%
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.261.700	3.250.000	11.700	99,64%	0,36%
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.242.200	0	3.242.200	0,00%	100,00%
g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.975.000	3.075.000	900.000	77,36%	22,64%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.800.000	44.575.500	3.224.500	93,25%	6,75%
a	Pengadaan Mebel	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.800.000	44.575.500	3.224.500	93,25%	6,75%
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.145.932	231.121.133	3.024.799	98,71%	1,29%
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.410.824	39.465.061	945.763	97,66%	2,34%
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000	7.000.000	0	100,00%	0,00%
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.735.108	184.656.572	2.078.536	98,89%	1,11%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.480.000	48.084.500	2.395.500	95,25%	4,75%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.200.000	21.689.000	1.511.000	93,49%	6,51%

b	Pemeliharaan Mebel	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.280.000	7.245.000	35.000	99,52%	0,48%
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	19.150.500	849.500	95,75%	4,25%
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.107.875	5.667.987	439.888	92,80%	7,20%
7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.250.000	1.018.500	231.500	81,48%	18,52%
a	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.250.000	1.018.500	231.500	81,48%	18,52%
8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.857.875	4.649.487	208.388	95,71%	4,29%
a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.357.875	2.224.487	133.388	94,34%	5,66%
b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.500.000	2.425.000	75.000	97,00%	3,00%
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.707.125	15.252.478	454.647	97,11%	2,89%
9	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	14.457.125	14.307.478	149.647	98,96%	1,04%
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2.865.000	2.776.800	88.200	96,92%	3,08%
b	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11.592.125	11.530.678	61.447	99,47%	0,53%
10	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.250.000	945.000	305.000	75,60%	24,40%
a	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	1.250.000	945.000	305.000	75,60%	24,40%
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.250.000	19.245.000	5.000	99,97%	0,03%
11	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.250.000	19.245.000	5.000	99,97%	0,03%
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19.250.000	19.245.000	5.000	99,97%	0,03%
12	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
a	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.237.500	5.125.000	112.500	97,85%	2,15%
13	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.237.500	5.125.000	112.500	97,85%	2,15%
a	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan nasional	300.000	300.000	0	100,00%	0,00%
b	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan bangsa	375.000	375.000	0	100,00%	0,00%
c	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	1.500.000	1.425.000	75.000	95,00%	5,00%
d	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.062.500	3.025.000	37.500	98,78%	1,22%
	TOTAL	8.019.121.356	6.028.107.484	1.991.013.872	75,17%	24,83%
B	PURWOKERTO WETAN					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	281.865.676	270.440.743	11.424.933	95,95%	4,05%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.900.000	14.100.000	1.800.000	88,68%	11,32%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.900.000	14.100.000	1.800.000	88,68%	11,32%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.265.200	84.960.610	4.304.590	95,18%	4,82%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.848.000	1.823.004	24.996	98,65%	1,35%
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.694.500	15.546.734	1.147.766	93,12%	6,88%
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.531.000	2.180.799	350.201	86,16%	13,84%
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.871.000	49.089.473	2.781.527	94,64%	5,36%
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.320.700	16.320.600	100	100,00%	0,00%
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
a	Pengadaan Mebel	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.256.476	137.292.342	2.964.134	97,89%	2,11%
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.090.700	23.340.326	2.750.374	89,46%	10,54%
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.500.000	3.500.000	0	100,00%	0,00%
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.665.776	110.452.016	213.760	99,81%	0,19%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.444.000	34.087.791	2.356.209	93,53%	6,47%

a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.274.000	10.333.500	1.940.500	84,19%	15,81%
b	Pemeliharaan Mebel	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.620.000	7.550.000	70.000	99,08%	0,92%
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.550.000	16.204.291	345.709	97,91%	2,09%
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	238.750.000	235.525.159	3.224.841	98,65%	1,35%
6	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	238.750.000	235.525.159	3.224.841	98,65%	1,35%
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	3.750.000	3.750.000	0	100,00%	0,00%
b	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35.000.000	34.400.013	599.987	98,29%	1,71%
c	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	200.000.000	197.375.146	2.624.854	98,69%	1,31%
	TOTAL	520.615.676	505.965.902	14.649.774	97,19%	2,81%
C	ARCAWINANGUN					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	323.778.408	313.384.726	10.393.682	96,79%	3,21%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.050.000	22.050.000	0	100,00%	0,00%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.050.000	22.050.000	0	100,00%	0,00%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.676.608	68.659.804	4.016.804	94,47%	5,53%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	400.000	400.000	0	100,00%	0,00%
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.732.000	5.682.076	49.924	99,13%	0,87%
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.352.000	1.352.000	0	100,00%	0,00%
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.072.208	50.655.928	3.416.280	93,68%	6,32%
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.118.500	10.569.800	548.700	95,06%	4,94%
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.900	0	1.900	0,00%	100,00%
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
a	Pengadaan Mebel	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.946.800	213.796.422	4.150.378	98,10%	1,90%
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.881.692	24.957.696	2.923.996	89,51%	10,49%

b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	3.000.000	0	100,00%	0,00%
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.065.108	185.838.726	1.226.382	99,34%	0,66%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.105.000	8.878.500	2.226.500	79,95%	20,05%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.075.000	6.928.500	2.146.500	76,35%	23,65%
b	Pemeliharaan Mebel	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.030.000	1.950.000	80.000	96,06%	3,94%
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	221.467.500	213.947.414	7.520.086	96,60%	3,40%
6	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	221.467.500	213.947.414	7.520.086	96,60%	3,40%
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	3.850.000	3.680.000	170.000	95,58%	4,42%
b	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17.617.500	16.695.000	922.500	94,76%	5,24%
c	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	200.000.000	193.572.414	6.427.586	96,79%	3,21%
	TOTAL	545.245.908	527.332.140	17.913.768	96,71%	3,29%
D	KRANJI					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	318.944.708	309.974.492	8.970.216	97,19%	2,81%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.900.000	15.700.000	1.200.000	92,90%	7,10%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16.900.000	15.700.000	1.200.000	92,90%	7,10%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.407.800	56.890.751	1.517.049	97,40%	2,60%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	681.000	681.000	0	100,00%	0,00%
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.087.800	7.022.781	65.019	99,08%	0,92%
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	886.000	886.000	0	100,00%	0,00%
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.376.900	43.926.770	1.450.130	96,80%	3,20%
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.374.200	4.374.200	0	100,00%	0,00%
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.900	0	1.900	0,00%	100,00%
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.000.000	5.750.000	250.000	95,83%	4,17%
a	Pengadaan Mebel	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	5.750.000	250.000	95,83%	4,17%
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.156.908	222.295.741	5.861.167	97,43%	2,57%
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.091.800	32.456.885	2.634.915	92,49%	7,51%
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	4.000.000	2.000.000	66,67%	33,33%
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.065.108	185.838.856	1.226.252	99,34%	0,66%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.480.000	9.338.000	142.000	98,50%	1,50%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.420.000	5.278.000	142.000	97,38%	2,62%
b	Pemeliharaan Mebel	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.060.000	4.060.000	0	100,00%	0,00%
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	246.000.000	243.887.652	2.112.348	99,14%	0,86%
6	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	246.000.000	243.887.652	2.112.348	99,14%	0,86%
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2.000.000	1.999.800	200	99,99%	0,01%
b	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	24.000.000	23.850.000	150.000	99,38%	0,63%
c	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	200.000.000	198.037.852	1.962.148	99,02%	0,98%
	(Pokir tenda)	20.000.000	20.000.000	0	100,00%	0,00%
	TOTAL	564.944.708	553.862.144	11.082.564	98,04%	1,96%
E	MERSI					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	263.486.901	239.881.269	23.605.632	91,04%	8,96%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.900.000	21.900.000	0	100,00%	0,00%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.900.000	21.900.000	0	100,00%	0,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.119.625	56.632.326	8.487.299	86,97%	13,03%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	944.000	944.000	0	100,00%	0,00%
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.986.450	11.676.801	309.649	97,42%	2,58%
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.916.000	1.855.540	60.460	96,84%	3,16%
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.260.000	36.858.385	7.401.615	83,28%	16,72%
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.013.175	5.297.600	715.575	88,10%	11,90%
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!

2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
a	Pengadaan Mebel	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.751.276	138.063.443	12.687.833	91,58%	8,42%
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.185.500	30.563.605	11.621.895	72,45%	27,55%
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.500.000	4.500.000	0	100,00%	0,00%
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.065.776	102.999.838	1.065.938	98,98%	1,02%
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.716.000	23.285.500	2.430.500	90,55%	9,45%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.846.000	4.738.500	2.107.500	69,22%	30,78%
b	Pemeliharaan Mebel	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.870.000	3.870.000	0	100,00%	0,00%
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	14.677.000	323.000	97,85%	2,15%
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	228.430.000	225.944.355	2.485.645	98,91%	1,09%
5	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	228.430.000	225.944.355	2.485.645	98,91%	1,09%
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	1.700.000	1.700.000	0	100,00%	0,00%
b	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	26.730.000	25.952.355	777.645	97,09%	2,91%
c	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	200.000.000	198.292.000	1.708.000	99,15%	0,85%
	TOTAL	491.916.901	465.825.624	26.091.277	94,70%	5,30%
F	PURWOKERTO LOR					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	319.737.808	312.287.051	7.450.757	97,67%	2,33%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.400.000	21.300.000	100.000	99,53%	0,47%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0	#DIV/0!	#DIV/0!
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.400.000	21.300.000	100.000	99,53%	0,47%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.969.950	70.312.352	2.657.598	96,36%	3,64%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.668.000	2.668.000	0	100,00%	0,00%
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.081.250	10.791.797	289.453	97,39%	2,61%
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	5.000.000	0	100,00%	0,00%

d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.647.000	45.268.955	1.378.045	97,05%	2,95%
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.573.700	6.583.600	990.100	86,93%	13,07%
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.500.000	5.372.400	127.600	97,68%	2,32%
a	Pengadaan Mebel	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000	5.372.400	127.600	97,68%	2,32%
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.847.858	209.472.299	3.375.559	98,41%	1,59%
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.782.750	19.633.573	2.149.177	90,13%	9,87%
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000	4.000.000	0	100,00%	0,00%
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.065.108	185.838.726	1.226.382	99,34%	0,66%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.020.000	5.830.000	1.190.000	83,05%	16,95%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.580.000	3.430.000	1.150.000	74,89%	25,11%
b	Pemeliharaan Mebel	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.440.000	2.400.000	40.000	98,36%	1,64%
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	223.481.112	221.641.500	1.839.612	99,18%	0,82%
6	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	223.481.112	221.641.500	1.839.612	99,18%	0,82%
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2.000.000	1.448.500	551.500	72,43%	27,58%
b	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21.481.112	21.163.000	318.112	98,52%	1,48%
c	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	200.000.000	199.030.000	970.000	99,52%	0,49%
	TOTAL	543.218.920	533.928.551	9.290.369	98,29%	1,71%
G	SOKANEGARA					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	291.628.828	280.894.091	10.734.737	96,32%	3,68%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.900.000	18.150.000	3.750.000	82,88%	17,12%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0	#DIV/0!	#DIV/0!
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.900.000	18.150.000	3.750.000	82,88%	17,12%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.254.212	63.179.700	1.074.512	98,33%	1,67%

a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.790.800	3.784.000	6.800	99,82%	0,18%
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.543.500	5.293.000	250.500	95,48%	4,52%
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.508.012	48.692.700	815.312	98,35%	1,65%
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	5.410.000	5.410.000	0	100,00%	0,00%
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.900	0	1.900	0,00%	100,00%
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
a	Pengadaan Mebel	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.786.616	185.312.391	4.474.225	97,64%	2,36%
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.887.952	21.586.635	3.301.317	86,74%	13,26%
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.500.000	5.500.000	0	100,00%	0,00%
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.398.664	158.225.756	1.172.908	99,26%	0,74%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.688.000	14.252.000	1.436.000	90,85%	9,15%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.999.000	6.382.000	617.000	91,18%	8,82%
b	Pemeliharaan Mebel	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.880.000	2.140.000	740.000	74,31%	25,69%
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.809.000	5.730.000	79.000	98,64%	1,36%
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	223.850.300	221.460.338	2.389.962	98,93%	1,07%
6	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	223.850.300	221.460.338	2.389.962	98,93%	1,07%
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	3.050.000	3.050.000	0	100,00%	0,00%
b	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.800.300	20.670.000	130.300	99,37%	0,63%
c	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	200.000.000	197.740.338	2.259.662	98,87%	1,13%
	TOTAL	515.479.128	502.354.429	13.124.699	97,45%	2,55%

Sumber: SIPD Penatausahaan, 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Capaian realisasi tertinggi adalah Kelurahan purwokerto Lor sebesar 98,29% dan yang terendah adalah Kecamatan Purwokerto Timur dengan capaian realisasi sebesar 75,17%.

D. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Untuk Efektifitas Anggaran terhadap capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2025 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.49
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	1	105,4	9.117.377.752	81,40
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	2	110,80	1.407.696.883	98,56
3	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	2	100,01	7.709.680.869	78,89

Tabel 3.50
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tahun 2025
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4-5
1	Tujuan: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	1	105,4	81,40	24,00
2	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	2	107,67	98,56	9,11
3	Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan	2	100,01	78,89	21,12
4	Program 1:	1	105,9	92,8	21,12
	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik				
	Indikator:				
	Indeks Kepuasan Masyarakat				
5	Program 2:	1	95,83	98,57	
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
	Indikator:				
	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				

6	Program 3:	1	125	99,97	21,12
	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan				
	Indikator:				
	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas				
7	Program 4:	1	95,83	97,85	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
	Indikator:				
	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan				
Jumlah		9	105,09	92,58	12,51

Sumber: E-Monev Kecamatan purwokerto Timur,2025

Berdasarkan tabel diatas dari 9 (sembilan) indikator memiliki rata-rata capaian kinerja melebihi rata-rata realisasi anggaran. Rata-rata capaian kinerja sebesar 105,09% dengan rata -rata realisasi anggaran 92,58% dengan tingkat efisiensi rata-rata 12,51%, menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja telah tercapai meskipun belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.

▪ **Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa**

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia barang/jasa Pengadaan Langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 19 paket pekerjaan dengan total HPS sebesar Rp 1.081.121.738,- realisasi nilai kontrak sebesar Rp 1.078.099.590,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 3.022.148,- atau 0,28%.

Untuk pengadaan barang/jasa yang sudah tersedia di dalam *e-Catalog* dilaksanakan dengan metode *e-Purchasing* dan pada tahun 2025 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas telah melaksanakan sebanyak 15 paket dengan nilai total rencana pengadaan sebesar Rp 323.584.722,- realisasi pengadaan sebesar Rp 305.375.434,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 18.209.287,99 atau 0,28%.

E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi dan penghargaan yang diterima pada tahun 2025 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas:

1. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik pada Penilaian PEKPPP Mandiri Instansional Tahun 2025 kategori Kecamatan (Peringkat ketiga dengan nilai 4,07)



F. INOVASI

Nama Inovasi : “PELAS CAMPUR” (Pelayanan Malam Sabtu Kecamatan Purwokerto Timur).

Inovator : Wiwit Wurjaningsih , S.Sos

Pelas Campur, atau Pelayanan Malam Sabtu Kecamatan Purwokerto Timur, merupakan inovasi pelayanan administrasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sibuk bekerja pada hari kerja. Pelayanan ini dilaksanakan setiap hari Jum’at malam, mulai pukul 19.00 s/d 21.00 WIB, di kantor Kecamatan Purwokerto Timur.

Pelaksanaan pelayanan dilakukan dengan sistem antrian elektronik untuk memastikan efisiensi dan kenyamanan masyarakat. Berbagai jenis layanan administrasi tersedia, mulai dari pembuatan KTP, KK, hingga layanan-layanan lainnya yang biasanya hanya bisa diakses pada jam kerja biasa.

Inovasi Pelas Campur berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya bagi mereka yang selama ini mengalami kesulitan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan terutama yang bekerja di luar kota dan juga bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Purwokerto Timur serta untuk meningkatkan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu pada jam kerja konvensional. Dan dengan adanya Pelas Campur, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan dokumen kependudukan yang valid dan sah.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, ditetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator dan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator:

1. Tujuan dengan 1 (satu) indikator Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dengan target 100%, realisasi capaian kinerja 105,4%
2. Sasaran I terdiri 2 (dua) indikator Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan dengan target 100%, realisasi 105,64% dan capaian 105,64%. Indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan dengan target 3,71 dengan realisasi 4,07 dengan capaian 109,7%.
3. Sasaran II terdiri 2 (dua) indikator Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan dengan target Nilai 83,92 (A), terealisasi 82,20 dengan capaian 97,95%. Indikator Nilai Maturitas SPIP Kecamatan dengan target nilai 3,35, realisasi nilai 3,419 dengan capaian 102,06%

Rata-rata capaian kinerja Kecamatan Purwokerto Timur sebesar 105,09% menunjukkan bahwa sebagian besar target telah mendekati hasil yang diharapkan. Namun masih terdapat indikator yang belum memenuhi target yaitu indikator Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan sebesar 97,95% yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk peningkatannya. Disisi lain beberapa indikator menunjukkan hasil yang sangat baik. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat pada triwulan IV tahun 2025 melampaui target dengan capaian 105,9% menandakan tingginya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 125%, Capaian kinerja program yang belum mencapai 100% adalah program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 95,83% dan program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 95,83% dikarenakan adanya refokusing/efisiensi anggaran.

Anggaran Perubahan TA 2025 sebesar Rp 11.200.542.597,- (sebelas milyar dua ratus juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan realisasi Rp 9.117.376.274,-(sembilan milyar seratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh

puluh empat rupiah) atau sebesar 81,40%, dengan demikian tahun 2025 Silpa Kecamatan Purwokerto Timur sebesar Rp 2.083.166.323,-(dua milyar delapan puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) atau sekitar 18,60%. Silpa terbesar pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp 1.972.010.226 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) karena banyaknya pegawai yang pensiun dan mutasi yang menyebabkan banyaknya kekosongan jabatan/pegawai.

Berdasarkan hasil realisasi kinerja sasaran dan keuangan dan dibandingkan target kinerja tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa efisiensi mengelola anggaran dalam mewujudkan target kinerja sasaran dengan tingkat efisiensinya adalah 12,51%.

Perlu upaya lebih optimal untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik agar target dapat tercapai.

B. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dan perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Meskipun beberapa indikator kinerja telah mencapai target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik. Sehubungan dengan kondisi tersebut, Rekomendasi dan langkah peningkatan kinerja yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.
2. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur.
3. Penyempurnaan mekanisme umpan balik dari masyarakat untuk meningkatkan responsivitas pelayanan.
4. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data untuk memastikan capaian kinerja yang akurat.
5. Penguatan koordinasi dengan stakeholder guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.
6. Optimalisasi perencanaan dan penggunaan anggaran untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian sasaran.

7. Mendorong inovasi dan solusi kreatif dengan cara Memanfaatkan teknologi digital, Memberikan contoh dengan menunjukkan sikap terbuka terhadap ide-ide baru

Dari langkah-langkah tersebut, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, efisien serta berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.

Demikian laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas kami susun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kecamatan Purwokerto Timur dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Purwokerto, 16 Maret 2026
Camat Purwokerto Timur

OKA YUDHISTIRA PRANAYUDHA, S.STP.,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19811212 200012 1 003

